



Wajib Isi Rencana Kerja dan Rapat Online

Upaya Pengawasan, Antisipasi WFH Dimanfaatkan ASN untuk Liburan

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menyiapkan skema pengawasan ketat terhadap aparat sipil negara (ASN) yang melaksanakan *work from home* (WFH). Seperti melalui pengisian rencana kerja hingga rapat yang digelar secara *online*.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, meski menjalani WFH para ASN di bawah eselon tiga tetap bekerja seperti biasa atau 5,5 jam per hari. Sehingga meskipun di rumah, wajib melaporkan kerjanya secara berkala kepada atasan melalui *google form* masing-masing instansi.

"Jadi misalkan 5,5 jam itu pagi mau apa, siang mau apa, setelah itu sore di-*approve* oleh masing-masing atasannya secara virtual," ujar Hasto saat ditemui di Balai Kota Jogja Jumat (10/4).

Hasto juga meminta agar setiap atasan instansi lebih kreatif. Misal-

nya jika pegawai yang WFH tidak memiliki rencana kerja untuk hari berikutnya, tiap atasan harus bisa membagi tugas ke masing-masing pegawai yang bekerja dari rumah.

Menurut Hasto, berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pegawai eselon dua dan tiga atau setara kepala dinas dan kepala bidang tetap diminta untuk ke kantor. Sehingga menurutnya pengawasan lebih mudah untuk dilakukan.

Lebih lanjut, pengawasan pegawai yang WFH juga dilakukan dengan penerapan rapat melalui Zoom secara berkala. Sehingga para atasan yang bekerja dari kantor wajib memberikan arahan pekerjaan kepada bawahannya.

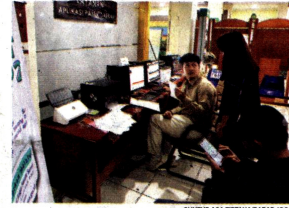
Upaya pengawasan ketat juga dilakukan melalui pengisian rencana kerja. Jika tidak mengisi rencana kerja yang disediakan oleh atasan, maka pegawai WFH dianggap bolos atau tidak bekerja tanpa izin.

"Terkait sanksi sudah ada ketentuannya, jika tidak masuk sekian hari teguran ringan. Kalau sekian hari lagi teguran berat, itu sudah ada ketentuannya," tegas Hasto.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja Sarwanto menyampaikan, penerapan WFH hari pertama pada Jumat (10/4), ada 201 pegawai yang bekerja dari rumah. Jumlah tersebut hanya 2,8 persen dari total pegawai Pemkot yang mencapai 7.115 orang. Sarwanto menyebut, hanya sebatas organisasi perangkat daerah (OPD) yang menerapkan WFH. Instansi yang menerapkan hanya

yang memiliki ketugasan administratif. Seperti bagian administrasi pembangunan, badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), BKPSDM, inspektorat, dan sebagian dari dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman serta dinas perdagangan.

"Hanya sebagian OPD yang WFH, karena memang sebagian besar (OPD di Pemkot Jogja, Red) merupakan pelayanan langsung pada masyarakat," sebut Sarwanto. (inu/eno/zi)



LAYANAN TETAP BUKA: Pegawai melayani masyarakat yang mengurus pajak daerah di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemkot Jogja Jumat (10/4). Pengawasan virtual pegawai selama penerapan kebijakan WFH dilakukan melalui pemantauan kinerja berbasis digital.

Unit Pelayanan Publik di Bantul Tetap Buka

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bantul telah menerapkan *work from home* (WFH) setiap Jumat. Namun, pelayanan publik di Bantul tetap dibuka.

Seperti pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul, serta Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul.

Kepala Disdukcapil Bantul Kwintarto Heru Prabowo mengatakan, pihaknya tetap menerapkan *work from office* (WFO) untuk menjaga layanan administrasi kependudukan (adminduk) tetap berjalan dengan optimal. Sehingga dia memastikan, masyarakat tetap bisa mengurus akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), kartu identitas anak (KIA), identitas kependudukan digital (IKD), dan kartu keluarga (KK) di kantor disdukcapil.

"Jadi jangan khawatir, pelayanan

warga Bantul tidak terganggu sama sekali," jelasnya kemarin (12/4).

Meski demikian, lanjut Kwintarto, masyarakat tetap bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor. Yakni dengan memanfaatkan aplikasi Dukcapil Smart Web. "Lebih praktis jika menggunakan layanan daring," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Pajak dan Daerah BPKPAD Bantul Yusri Ambar-

wati mengatakan, pihaknya tidak memberlakukan WFH di kantor maupun di unit pelayanan di hari Jumat. Sebab, banyak warga yang mengurus pajak daerah ke kantor.

"Jadi tidak semuanya bisa lewat *online*, kebanyakan masyarakat yang sudah tua-tua senengnya malah ke kantor," bebernyanya.

Pelayanan pajak di BPKPAD, kata dia, dibuka dari pukul 08.00-15.00. (cin/eno/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005